



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Menimbang : a. bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2024 di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRiE

- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
- 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
- 5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);
- 6 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 439 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1740 Tahun 2016 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, dan setiap saat.

KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ini.

KETIGA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berkala

No	Ringkasan Isi	Pejabat/Unit/ Satuan Kerja Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan / Penerbitan Informasi	Tempat dan Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan / Retensi Arsip
					Cetak	Rekam	Online	
1	Profil Kementerian Komunikasi dan Informatika :							
	a. Informasi tentang kedudukan/domisili/alamat lengkap kantor Kementerian Kominfo	Biro Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hubungan Masyarakat	Jakarta, 2024		√	√	2 tahun
	b. Ruang lingkup kegiatan, maksud, dan tujuan	Biro Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hubungan Masyarakat	Jakarta, 2024		√	√	2 tahun
	c. Tugas dan fungsi Kementerian Kominfo beserta kantor unit di bawahnya	Biro Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hubungan Masyarakat	Jakarta, 2024		√	√	2 tahun
	d. Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural	Biro Kepegawaian dan Organisasi	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi	Jakarta, 2023		√	√	2 tahun

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRiE

	e. LHKPN bagi Pejabat Negara yang telah diperiksa, diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK ke Kementerian Kominfo	Biro Kepegawaian dan Organisasi	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi	Jakarta, 2023			√	2 tahun
2	Program / kegiatan Kementerian Kominfo	Unit Kerja Eselon 1 & BLU	Sekretaris Unit Kerja Eselon 1 & BLU	Jakarta, 2024		√	√	1 tahun
3	Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Kementerian Kominfo	Biro Umum	Kepala Biro Umum	Jakarta, 2024		√	√	1 tahun
4	Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara	Biro Kepegawaian dan Organisasi	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi	Jakarta, 2024			√	2 tahun
5	Informasi tentang penerimaan peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan dan latihan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kominfo	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jakarta, 2024		√	√	1 tahun
6	Ringkasan informasi tentang kinerja tahun 2023	Biro Perencanaan	Kepala Biro Perencanaan	Jakarta, 2024		√	√	1 tahun
7	Ringkasan laporan keuangan tahun 2023 (audited) yang terdiri atas : a. Rencana dan laporan realisasi anggaran b. Neraca c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan d. Daftar Aset dan Investasi	Biro Keuangan	Kepala Biro Keuangan	Jakarta, 2024		√	√	1 tahun
8	Ringkasan laporan akses informasi publik (jumlah pemohon, waktu pemenuhan informasi publik, jumlah permohonan informasi yang dikabulkan/ditolak, alasan penolakan)	Biro Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hubungan Masyarakat	Jakarta, 2024		√	√	2 tahun
9	Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang berdampak bagi publik							

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

	a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Biro Hukum	Kepala Biro Hukum	Jakarta, 2024	√	√		1 tahun
	b. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan/diterapkan	Biro Hukum	Kepala Biro Hukum	Jakarta, 2024	√		√	1 tahun
10	Hak dan tata cara memperoleh informasi publik	Biro Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hubungan Masyarakat	Jakarta, 2024		√	√	2 tahun
11	Hak dan tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi.	Biro Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hubungan Masyarakat	Jakarta, 2024		√	√	2 tahun
12	Tata cara pengaduan dan penyalahgunaan wewenang	Inspektorat Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Jakarta, 2024		√	√	2 tahun
13	Informasi tentang ketenagakerjaan dan SOP Kepegawaian	Biro Kepegawaian dan Organisasi	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi	Jakarta, 2024		√	√	2 tahun
14	Pengumuman paket pengadaan barang dan jasa tahun 2024	Biro Umum	Kepala Biro Umum	Jakarta, 2024		√	√	1 tahun
15	Prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat	Biro Umum	Kepala Biro Umum	Jakarta, 2023		√	√	2 tahun

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

Informasi Serta Merta

No	Ringkasan Isi	Pejabat / Unit / Satuan Kerja Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan / Penerbitan Informasi	Tempat dan Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan / Retensi Arsip
					Cetak	Rekam	Online	
1	Informasi Mengenai Penanganan Judi Online	Biro Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hubungan Masyarakat	Jakarta, 2024		√	√	1 tahun
2	Laporan Isu Hoaks	Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika	Direktur Jenderal Aplikasi Informatika	Jakarta, 2024		√	√	1 tahun
3	Informasi mengenai penanganan pemulihan Pusat Data Nasional Sementara	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	Jakarta, 2024		√	√	1 tahun

Tersedia Setiap Saat

No	Ringkasan Isi	Pejabat / Unit / Satuan Kerja Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan / Penerbitan Informasi	Tempat dan Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia			Jangka Waktu Penyimpanan / Retensi Arsip
					Cetak	Rekam	Online	
1.	Informasi tentang penerimaan peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Pusdiklat Kominfo dan Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi	Kepala Pusdiklat Kominfo dan Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi	Jakarta, 2024	√		√	2 tahun
2.	Informasi Beasiswa Kominfo S2 Dalam Negeri dan Luar Negeri	Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi	Kepala Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi	Jakarta, 2024			√	2 tahun

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

3.	Studi <i>Grand Design</i> Penomoran Televisi Digital <i>free-to-air</i> Indonesia	Puslitbang SDPPPI	Kepala Puslitbang SDPPPI	Jakarta, 2020			✓	5 tahun
4.	Studi Kebijakan Penomoran <i>Internet of Things (IOT) / Machine to machine Communication</i> pada Jaringan Seluler	Puslitbang SDPPPI	Kepala Puslitbang SDPPPI	Jakarta, 2020			✓	5 tahun
5.	Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia : Strategi dan Sektor Potensial	Puslitbang APTIKA dan IKP	Kepala Puslitbang APTIKA dan IKP	Jakarta, 2019			✓	5 tahun
6.	Survey Penggunaan TIK serta Implikasinya Terhadap Aspek Sosial, Budaya dan Ekonomi Masyarakat	Puslitbang APTIKA dan IKP	Kepala Puslitbang APTIKA dan IKP	Jakarta, 2019			✓	5 tahun
7.	Laporan Tahunan Ditjen IKP	Sekretariat Ditjen IKP	Sekretaris Ditjen IKP	Jakarta, 2020	√	√		5 Tahun
8.	Perjanjian Kerja Sama bidang informasi dan komunikasi publik	Sekretariat Ditjen IKP	Sekretaris Ditjen IKP	Jakarta, 2020	√	√		5 Tahun
9.	Peraturan perundang-undangan bidang informasi dan komunikasi publik	Sekretariat Ditjen IKP	Sekretaris Ditjen IKP	Jakarta, 2020	√	√		5 Tahun
10.	Kebijakan non peraturan perundang-undangan bidang informasi dan komunikasi publik	Sekretariat Ditjen IKP	Sekretaris Ditjen IKP	Jakarta, 2020	√			5 Tahun
11.	Produk e-book infografis	Direktorat Pengelolaan Media	Direktur Pengelolaan Media	Jakarta, 2020	√	√		5 tahun
12.	Produk infografis Indonesibaik.id	Direktorat Pengelolaan Media	Direktur Pengelolaan Media	Jakarta, 2020		√		5 tahun
13.	Produk berita infopublik.id	Direktorat Pengelolaan Media	Direktur Pengelolaan Media	Jakarta, 2020			√	5 tahun
14.	Komik Komunika	Direktorat Pengelolaan Media	Direktur Pengelolaan Media	Jakarta, 2020	√	√		5 tahun

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

15.	Produk jurnal dialog kebijakan publik	Direktorat Pengelolaan Media	Direktur Pengelolaan Media	Jakarta, 2020	√	√		5 tahun
16.	Profil Museum Monumen Pers Nasional	Monumen Pers Nasional	Kepala Monumen Pers Nasional	Jakarta, 2019	√			10 tahun
17.	Laporan Monitoring Isu Publik	Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim	Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim	Jakarta, 2020		√		5 tahun
18.	Produk informasi publik Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik	Direktorat Jenderal IKP	Direktur Jenderal IKP	Jakarta, 2020	√	√		5 tahun
19.	Daftar Penyelenggaran Sistem Elektronik (https://pse.kominfo.go.id/pse-terdaftar)	Direktorat Tata Kelola Aptika	Direktur Tata Kelola Aptika	Jakarta, 2020			√	5 Tahun
20.	Daftar Auditor, Implementor, Lembaga Sertifikasi dan Lembaga Konsultasi SMPI	Direktorat Tata Kelola Aptika	Direktur Tata Kelola Aptika	Jakarta, 2020			√	5 Tahun
21.	Daftar Domain Whitelist Nusantara	Direktorat Tata Kelola Aptika	Direktur Tata Kelola Aptika	Jakarta, 2020			√	5 Tahun
22.	Data Koleksi Museum Penerangan yang telah diregistrasi	Museum Penerangan	Kepala Museum Penerangan	Jakarta, 2020	√	√		5 tahun
23.	Daftar Koleksi Monumen Pers Nasional	Monumen Pers Nasional	Kepala Monumen Pers Nasional	Jakarta, 2020		√		10 tahun
24.	Hasil Kajian Koleksi Monumen Pers Nasional	Monumen Pers Nasional	Kepala Monumen Pers Nasional	Jakarta, 2020		√		10 tahun
25.	Laporan Tahunan Monumen Pers Nasional	Monumen Pers Nasional	Kepala Monumen Pers Nasional	Jakarta, 2020		√		10 tahun
26.	Data Rekap Sistem Elektronik instansi Pemerintahan yang sudah terdaftar	Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan	Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan	Jakarta, 2020 (Data 2017-2020)	√			5 tahun

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

27.	Daftar Informasi Publik	Biro Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hubungan Masyarakat	Jakarta, 2024	√	√	√	1 tahun
28.	Informasi tentang peraturan, keputusan dan kebijakan	Biro Hukum	Kepala Biro Hukum	Jakarta, 2024			√	1 tahun
29.	Syarat dan prosedur pengajuan izin bidang telekomunikasi	Ditjen PPI, Ditjen SDPPI	Sekretaris Ditjen SDPPI, Sekretarid Ditjen PPI	Jakarta, 2024	√	√	√	1 tahun
30.	Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, terdiri atas : a. Sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya b. Sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya c. Anggaran layanan Informasi Publik d. Laporan penggunaan	Biro Hubungan Masyarakat	Kepala Biro Hubungan Masyarakat	Jakarta, 2024	√	√	√	1 tahun
31.	Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan masyarakat serta laporan penindakannya	Inspektorat Jenderal	Sekretaris Inspektur Jenderal	Jakarta, 2024		√		1 tahun
32.	Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum	Unit Kerja Eselon 1 dan BLU	Sekretaris Unit Kerja Eselon 1 dan BLU	Jakarta, 2024		√		1 tahun
33.	Informasi seleksi terbuka Jabatan Tinggi Madya dan Pratama a. Pengumuman Seleksi Terbuka/Pengisian JPT b. Pengumuman Perpanjangan Seleksi Terbuka	Biro Kepegawaian dan Organisasi	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi	Jakarta, 2024	√	√	√	1 tahun

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

	<p>c. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi dan Jadwal Tes Penulisan Makalah</p> <p>d. Pengumuman Hasil Tes Penulisan Makalah dan Jadwal Tes Asesmen</p> <p>e. Pengumuman Hasil Tes Asesmen dan Jadwal Tes Wawancara</p> <p>f. Pengumuman 3 (tiga) besar</p>							
34.	<p>Informasi Indonesia Game Rating System: Nama Perusahaan Nama Aplikasi Nama Pemimpin/Pemilik Tipe Game (Genre) Platform Tanggal Rilis Versi Informasi Pengemasan Fitur Game Deskripsi</p>	Direktorat Ekonomi Digital	Direktur Ekonomi Digital	Jakarta, 2023			√	2 tahun
35.	Data Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan	Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan	Jakarta, 2021			√	5 tahun
36.	Data Instansi Pengguna aplikasi siCantik	Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan	Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan	Jakarta, 2021	√	√		5 tahun
37.	Data Pengguna Aplikasi siMaya	Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan	Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan	Jakarta, 2021			√	5 tahun

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

38.	Syarat-syarat perizinan dan laporan penataan izin yang diberikan	Ditjen PPI	Sekretaris Ditjen PPI	Jakarta, 2024			√	1 tahun
39.	Daftar Kementerian/Lembaga yang mengajukan permintaan Clearance atas pengadaan belanja perangkat TIK pemerintah tahun anggaran 2021	Tim Tata Kelola Sistem Elektronik Pemerintahan	Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika	Jakarta, 2021		√		5 tahun
40.	Daftar Pemerintah Daerah yang telah mendapat pendampingan gerakan menuju Kota Cerdas	Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan	Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan	Jakarta, 2022		√		3 tahun
41.	Data Statistik Penggunaan Layanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS)	Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan	Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan	Jakarta, 2022		√		3 tahun
42.	Surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya	Inspektorat Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Jakarta, 2024	√	√		1 tahun
43.	Surat menyurat pimpinan/pejabat dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya	Inspektorat Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Jakarta, 2024	√	√		1 tahun
44.	Informasi mengenai Jasa Layanan <i>Core Business</i> di Lingkungan BBPPT: a. Daftar Acuan Teknis b. Simulasi Tarif Pengujian c. Informasi Tata Cara Pembayaran	Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi	Kepala BBPPT	Jakarta, 2024			√	1 tahun
45.	SOP Pelayanan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi	Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi	Kepala BBPPT	Jakarta, 2024			√	1 tahun

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

46.	Rekapitulasi Informasi Kabupaten/kota yang telah tersedia Call Center 112 tahun 2023	Ditjen PPI	Direktur Pengembangan Pitalebar	Jakarta, 2024		√	√	1 tahun
47.	Rekapitulasi BMN Ditjen PPI tahun 2023	Sekretariat Ditjen PPI	Sekretaris Ditjen PPI	Jakarta, 2024		√		1 tahun
48.	Buku Data Penyelenggaraan Pos dan Informatika Tahun 2023	Ditjen PPI	Direktur Pengendalian Pos dan Informatika	Jakarta, 2024		√		1 tahun
49.	Data Statistik Pengunjung Web Kominfo	Pusat Data dan Sarana Informatika	Kepala Pusat Data dan Sarana Informatika	Jakarta, 2024		√		1 Tahun
50.	Data Statistik Insiden Siber Kementerian Kominfo	Pusat Data dan Sarana Informatika	Kepala Pusat Data dan Sarana Informatika	Jakarta, 2024		√		1 Tahun
51.	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (imdi.sdmdigital.id)	Puslitbang APTIKA IKP	Kepala Puslitbang APTIKA IKP	Jakarta, 2024			√	2 Tahun

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E